

**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
KOTA DENPASAR
MENURUT
PENGELUARAN
2014-2018**





**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
KOTA DENPASAR
MENURUT
PENGELUARAN
2014-2018**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DENPASAR MENURUT PENGELUARAN 2014-2018

ISBN: 9786026395245

Nomor Publikasi: 51710.1904

Katalog: 9302020.5171

Ukuran Buku: 14,8 cm X 21 cm

Jumlah Halaman: xii + 96 halaman

Penyunting:

BPS Kota Denpasar

Naskah:

BPS Kota Denpasar

Desain Cover:

BPS Kota Denpasar

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Jl. Mulawarman No. 11, Denpasar

Telp. (0361) 418770 Fax. (0361) 434326

E-mail: bps5171@bps.go.id

Dicetak Oleh:

Percetakan Arysta Jaya

Jl. Jayagiri XIII No. 29, Denpasar

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/
atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

KATA PENGANTAR

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, dan Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Disadari bahwa penyajian publikasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Kendati demikian, selalu diupayakan adanya penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan. Untuk itu, kritik dan saran dari pengguna dan pemakai data sangat diharapkan dalam penyempurnaan publikasi sejenis di masa yang akan datang. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Denpasar, September 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Denpasar,


Eman Sulaeman, SST., M.A.P

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	8
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	15
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	17
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT.....	20
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah ..	23
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .	27
2.5 Perubahan Inventori.....	30
2.6 Ekspor-Impor	34
BAB III TINJAUAN EKONOMI KOTA DENPASAR	37
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	39
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	49
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga	50
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT.....	55
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	57
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	62
3.2.5 Perubahan Inventori.....	63
3.2.6 Ekspor Barang Dan Jasa	65
3.2.7 Impor Barang Dan Jasa	67

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KOTA DENPASAR	
	MENURUT PENGELUARAN	71
4.1	PDRB (Nominal)	73
4.2	Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PDRB	75
4.3	Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	76
4.4	Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor	77
4.5	Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB	79
4.6	Perbandingan PDRB Terhadap Impor	80
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	82
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	83
4.9	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) ...	86
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2014-2018	41
TABEL 3.2	PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2014-2018	42
TABEL 3.3	Distribusi PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018	44
TABEL 3.4	Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018	46
TABEL 3.5	Indeks Implisit PDRB Kota Denpasar Menurut Pengeluaran, 2014-2018	48
TABEL 3.6	Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kota Denpasar Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018	49
TABEL 3.7	Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Denpasar, 2014-2018	51
TABEL 3.8	Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Denpasar (Persen), 2014-2018	53
TABEL 3.9	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Denpasar (Persen), 2014-2018	55
TABEL 3.10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir LNPRT Kota Denpasar (Miliar Rp), 2014-2018	56

TABEL 3.11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Denpasar, 2014-2018	59
TABEL 3.12	Perkembangan PMTB Kota Denpasar, 2014-2018	63
TABEL 3.13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Denpasar, 2014-2018	65
TABEL 3.14	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Denpasar, 2014-2018	66
TABEL 3.15	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kota Denpasar, 2014-2018	69
TABEL 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Denpasar, 2014-2018	74
TABEL 4.2	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Denpasar, 2014-2018	75
TABEL 4.3	Rasio Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB Kota Denpasar, 2014-2018	77
TABEL 4.4	Rasio Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor Kota Denpasar, 2014-2018	78
TABEL 4.5	Rasio Ekspor Terhadap PMTB Kota Denpasar, 2014-2018	80
TABEL 4.6	Rasio Total PDRB Terhadap Impor Kota Denpasar 2014-2018	81
TABEL 4.7	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Denpasar, 2014-2018	82
TABEL 4.8	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kota Denpasar, 2014-2018	84
TABEL 4.9	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> Kota Denpasar, 2014-2018	87

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1	PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Triliun Rp), 2014-2018	40
GAMBAR 3.2	PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rp), 2014-2018.	43
GAMBAR 3.3	Perbandingan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rp), 2014-2018	43
GAMBAR 3.4	Distribusi PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2017	45
GAMBAR 3.5	Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018	47

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2014-2018	91
LAMPIRAN 2	Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2014-2018	92
LAMPIRAN 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018	93
LAMPIRAN 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018.....	94
LAMPIRAN 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar (2010=100) Menurut Pengeluaran, 2014-2018.....	95
LAMPIRAN 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar (2010=100) Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018.....	96



BAB I PENDAHULUAN

<https://denpasar.go.id>

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Meskipun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor



produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹⁾. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep²⁾ penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberikan manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut

¹⁾ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi).

²⁾ *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

(dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta Ekspor-Impor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan cara pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data-

PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³⁾, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “output akhir (*final output*)”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan untuk memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan-

³⁾ - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb:

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Dimana:

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat mengenai perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Salah satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun

data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan, dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena perekonomian suatu wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi, dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi

- dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
 - Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
 - Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
 - Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi, serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh: nilai tegakan padi, kelapa sawit, dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum

menghasilkan.

- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya untuk eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan

jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.

- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan basis data, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi
- Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metode FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured/FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Tabel 1.1
Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran
Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://denpasarkota.bps.go.id>

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

A. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

B. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

C. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose* (COICOP), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

D. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- b. Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- c. Sensus Penduduk 2010, BPS
- d. Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- e. Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

E. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga Berlaku (ADHB) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.



Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

A. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

B. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha.

LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

C. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lain.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dll.

D. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPRT), BPS

- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

E. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga Berlaku (ADHB);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/ Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan 2010 (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan:

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPRT.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)

A. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

B. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, *transfer social* dalam bentuk



barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

C. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

D. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan, dan Bappeda
- Statistik Keuangan Daerah, BPS
- Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan, dan Bappeda
- Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

E. Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia.}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan.
2. PK-P atas dasar harga Konstan 2010 diestimasi dengan cara *deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/ Kota terdekat
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Prov atau Kab/ Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

A. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

B. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer, dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal

pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

C. Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir/erosi.

D. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

E. Metode Estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data pada masing-masing daerah.

- Metode Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan 2010 diperoleh dengan cara *deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- Metode Tidak Langsung:

Pendekatan *Supply* = PMTB atas dasar harga Berlaku = Total *Supply* Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi = PMTB atas dasar harga Konstan 2010 (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 Perubahan Inventori (PI)

A. Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang investasi.

B. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku maupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

C. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku dan penolong (*material dan supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

- a. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website*

Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);

- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS;
- c. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
- e. Data komoditas perkebunan;
- f. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- h. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan
- i. Data ternak, Ditjennak Kementan.

E. Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan 2010 = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan 2010 = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB(t) - Inventori(t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB(t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan 2010 x IHPB rata-rata(t)

2.6 Ekspor-Impor

A. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

B. Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian ataupun hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

C. Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara nilai ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

D. Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasiya tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.





BAB III
TINJAUAN EKONOMI
KOTA DENPASAR

<https://denpasarkota.bps.go.id>

3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB dihitung dengan menggunakan tahun dasar yang baru yaitu tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu akan berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kota Denpasar atas dasar harga Berlaku di tahun 2018 meningkat sebesar 9,44 persen, yakni dari 47 triliun rupiah menjadi 51,44 triliun rupiah (2010=100). Sementara jika dinilai atas dasar harga Konstan 2010, ekonomi Kota Denpasar tumbuh sebesar 6,41 persen, yakni dari 32,11 triliun rupiah menjadi 34,17 triliun rupiah (2010=100).

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai menggeliat, perekonomian Kota Denpasar periode 2014-2018 dapat tetap tumbuh di atas 6 persen, yakni sebesar 7 persen; 6,14 persen; 6,51 persen; 6,06 persen; dan 6,41 persen. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha Konstruksi dan Jasa Kesehatan.

Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar didominasi oleh pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto PMTB) yang menyumbang lebih dari sepertiga total PDRB.

Pada periode tahun 2014-2018, PDRB Kota Denpasar atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni dari sebesar 34,21 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi sebesar 51,44 triliun rupiah pada tahun 2018. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB dari sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB menurut pengeluaran.

GAMBAR 3.1

PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Triliun Rp), 2014-2018



TABEL 3.1
PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	15 991.74	17 861.36	19 886.00	21 605.69	23 712.73
2. Konsumsi LNPRT	490.86	543.55	604.27	661.57	727.55
3. Konsumsi Pemerintah	4 270.15	4 706.57	5 487.78	6 164.49	6 819.19
4. PMTB	12 062.42	13 868.66	15 122.36	16 283.25	18 427.16
5. Perubahan Inventori	374.03	77.79	99.31	142.33	154.91
6. Ekspor	19 211.97	19 686.49	23 157.47	26 947.30	30 899.41
7. Impor	18 191.31	18 320.50	21 972.76	24 802.85	29 300.31
PDRB	34 209.87	38 423.92	42 384.43	47 001.77	51 440.63

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dinilai dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil.

TABEL 3.2

PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	13 264.59	14 197.90	15 200.79	15 953.22	16 948.31
2. Konsumsi LNPRT	375.58	380.02	407.80	430.58	458.74
3. Konsumsi Pemerintah	3 244.37	3 432.08	3 650.90	3 810.73	3 944.31
4. PMTB	9 842.35	10 664.16	11 576.44	11 994.38	13 096.01
5. Perubahan Inventori	194.89	39.05	49.11	52.67	55.64
6. Ekspor	18 308.07	18 442.66	18 745.72	20 588.94	22 192.67
7. Impor	18 451.27	18 733.18	19 357.38	20 721.09	22 527.58
PDRB	26 778.59	28 422.70	30 273.39	32 109.43	34 168.10

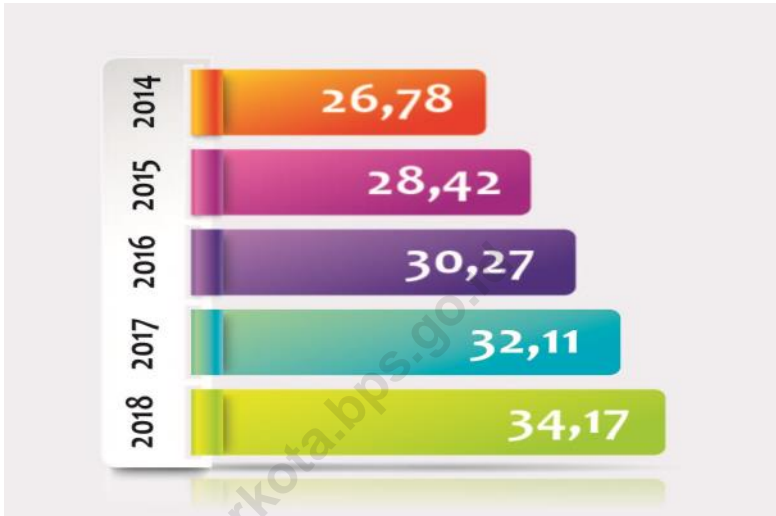
*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas tercatat bahwa dalam kurun waktu tahun 2014-2018 nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 di Kota Denpasar terus meningkat, yakni dari sebesar 26,78 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi sebesar 34,17 triliun rupiah pada tahun 2018. Sementara dari Gambar 3.5, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar mengalami percepatan, yakni dari 6,06 persen pada tahun 2017 menjadi 6,41 persen pada tahun 2018.

GAMBAR 3.2

PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rp), 2014-2018



GAMBAR 3.3

Perbandingan PDRB Kota Denpasar ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rp), 2014-2018



Dari Gambar 3.3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan 2010. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sementara pada PDRB atas dasar harga Konstan 2010, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan 2010 juga menunjukkan peningkatan.

TABEL 3.3
Distribusi PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi RT	46.75	46.49	46.92	45.97	46.10
2. Konsumsi LNPR	1.43	1.41	1.43	1.41	1.41
3. Konsumsi Pemerintah	12.48	12.25	12.95	13.12	13.26
4. PMTB	35.26	36.09	35.68	34.64	35.82
5. Perubahan Inventori	1.09	0.20	0.23	0.30	0.30
6. Ekspor	56.16	51.23	54.64	57.33	60.07
7. Impor	53.18	47.68	51.84	52.77	56.96
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*) Angka Sementara

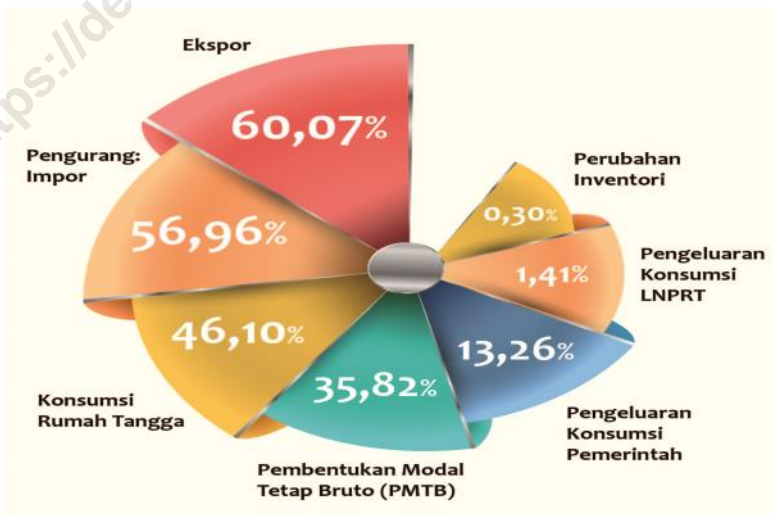
**) Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB menurut pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir-

Lembaga NonProfit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Ekspor Neto (E) atau nilai ekspor dikurangi nilai impor barang dan jasa.

Selama periode 2014-2018, PDRB Denpasar sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 35,26 sampai 36,09 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 51,23 hingga 60,07 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 47,68 sampai 56,96 persen.

Gambar 3.4
Distribusi PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2017



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 12,25 hingga 13,26 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2014-2018 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor. Kecenderungan pada periode tersebut menunjukkan posisi “surplus”.

TABEL 3.4

Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi RT	6.45	7.04	7.06	4.95	6.24
2. Konsumsi LNPRT	1.45	1.18	7.31	5.59	6.54
3. Konsumsi Pemerintah	-8.92	5.79	6.38	4.38	3.51
4. PMTB	1.12	8.35	8.55	3.61	9.18
5. Perubahan Inventori	-12.25	-79.96	25.76	7.25	5.63
6. Ekspor	13.65	0.74	1.64	9.83	7.79
7. Impor	5.85	1.53	3.33	7.04	8.72
PDRB	7.00	6.14	6.51	6.06	6.41

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator pertumbuhan ekonomi menggambarkan kinerja

pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4, selama periode tahun 2014-2018 pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar mengalami fluktuasi, yakni sebesar 7,00 persen (2014); 6,14 persen (2015); 6,51 persen (2016); 6,06 persen (2017); dan 6,41 persen (2018). Jika ditelaah menurut komponen pembentuknya, komponen PMTB memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 9,18 persen di tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan pembangunan di Kota Denpasar seperti pembangunan mega proyek Trans Studio Mall Bali. Kemudian diikuti oleh komponen Impor dan Ekspor yang mampu tumbuh masing-masing sebesar 8,72 persen dan 7,79 persen.

GAMBAR 3.5

Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018



TABEL 3.5

Indeks Implisit PDRB Kota Denpasar
Menurut Pengeluaran, 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi RT	120.56	125.80	130.82	135.43	139.91
2. Konsumsi LNPRT	130.69	143.03	148.18	153.65	158.60
3. Konsumsi Pemerintah	131.62	137.13	150.31	161.77	172.89
4. PMTB	122.56	130.05	130.63	135.76	140.71
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	104.94	106.74	123.53	130.88	139.23
7. Impor	98.59	97.80	113.51	119.70	130.06
PDRB	127.75	135.19	140.01	146.38	150.55

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi, maupun ekspor dan impor. Tabel 3.5 memberikan gambaran mengenai tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2014-2018, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen. Pertumbuhan indeks implisit tertinggi terjadi pada komponen Impor, sedangkan pertumbuhan harga terendah terjadi pada komponen konsumsi akhir LNPRT.

TABEL 3.6
 Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kota Denpasar
 Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi RT	3.68	4.35	3.99	3.52	3.31
2. Konsumsi LNPRT	12.19	9.44	3.60	3.69	3.22
3. Konsumsi Pemerintah	5.20	4.19	9.61	7.62	6.87
4. PMTB	5.08	6.11	0.45	3.92	3.65
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	6.63	1.72	15.73	5.95	6.38
7. Impor	-2.67	-0.81	16.07	5.45	8.66
PDRB	8.79	5.82	3.56	4.55	2.85

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori.

Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Denpasar untuk periode 2014-2018.

3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Denpasar, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Denpasar maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama, dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok bahan makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan, perkakas, dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2014-2018 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari sisi nominal (atas dasar harga Berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga Konstan 2010). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

TABEL 3.7
Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kota Denpasar, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
ADHB (Miliar Rp)	15 991.74	17 861.36	19 886.00	21 605.69	23 712.73
ADHK 2010 (Miliar Rp)	13 264.59	14 197.90	15 200.79	15 953.22	16 948.31
Proporsi terhadap PDRB ADHB (Persen)	46.75	46.49	46.92	45.97	46.10
Rata-rata Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Ribu Rp)					
ADHB	18 517.54	20 283.17	22 162.05	23 631.39	25 480.60
ADHK 2010	15 359.65	16 122.99	16 940.59	17 448.96	18 211.87
Pertumbuhan (Persen)					
Total Konsumsi Rumah Tangga	6.45	7.04	7.06	4.95	6.24
Konsumsi Per Kapita	4.30	4.97	5.07	3.00	4.37
Jumlah Penduduk	863 600	880 600	897 300	914 279	930 619

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selama periode 2014-2018 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB berfluktuasi, yaitu 46,75 persen (2014); 46,49 persen (2015); 46,92 persen (2016); 45,97 persen (2017); dan 46,10 persen (2018). Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Pada tahun 2014, setiap penduduk di Kota Denpasar menghabiskan dana sekitar 18,52 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 20,28 juta rupiah (2015); 22,16 juta rupiah (2016); 23,63 juta rupiah (2017); dan 25,48 juta rupiah (2018). Sementara itu, atas dasar harga Konstan 2010 rata-rata konsumsi per kapita tumbuh pada kisaran 3 sampai 5,07 persen.

Kenaikan rata-rata konsumsi per kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata

-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata pertumbuhan konsumsi per kapita secara “riil” selama periode 2014-2018 sebesar 4,34 persen. Peningkatan tersebut berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti pada tabel berikut.

TABEL 3.8
Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kota Denpasar (Persen), 2014-2018

Kelompok Konsumsi	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan, Minuman, dan Rokok	27.34	28.11	30.44	30.55	31.92
2. Pakaian dan Alas Kaki	3.15	3.11	3.24	3.25	3.15
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	14.45	14.24	13.76	13.47	13.60
4. Kesehatan & Pendidikan	6.28	6.75	7.14	6.59	6.53
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	18.97	18.17	17.73	18.44	17.82
6. Hotel & Restoran	23.58	22.58	21.03	21.27	20.34
7. Lainnya	6.23	7.05	6.66	6.44	6.64
Total Konsumsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



Pada tahun 2014 pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sebesar 6,45 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 7,04 persen (2015); 7,06 persen (2016); 4,95 persen (2017); dan 6,24 persen (2018). Sementara itu pertumbuhan konsumsi per kapita pada masing-masing tahun adalah 4,30 persen (2014); 4,97 persen (2015); 5,07 persen (2016); 3,0 persen (2017); dan 4,37 persen (2018). Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumah tangga lebih tinggi dari peningkatan konsumsi per kapita yang berada pada kisaran 3 sampai 5,07 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB Pengeluaran ini.

Sementara itu, tingkat perubahan harga secara implisit menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya pada masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Rincian peningkatan harga pada total konsumsi rumah tangga masing-masing sebesar 3,68 persen (2014); 4,35 persen (2015); 3,99 persen (2016); 3,52 persen (2017); dan 3,31 persen (2018). Pada kelompok konsumsi makanan, minuman, dan rokok mengalami peningkatan harga sebesar 3,79 persen di tahun 2014, kemudian berfluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan harga tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 7,29 persen, sementara peningkatan harga terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,75 persen.

TABEL 3.9

Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Denpasar (Persen), 2014-2018

Kelompok Konsumsi	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan, Minuman, dan Rokok	3.79	6.62	7.29	3.75	6.03
2. Pakaian dan Alas Kaki	0.90	6.43	4.98	2.19	0.88
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2.02	3.05	0.90	5.30	-2.97
4. Kesehatan & Pendidikan	-2.72	3.87	4.94	0.13	2.78
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5.78	3.37	2.28	2.46	2.01
6. Hotel & Restoran	5.19	3.30	2.80	4.34	4.43
7. Lainnya	4.41	3.20	0.25	3.05	4.61
Total Konsumsi	3.68	4.35	3.99	3.52	3.31

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

TABEL 3.10

Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir LNPRT
Kota Denpasar (Miliar Rp), 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
ADHB (Miliar Rp)	490.86	543.55	604.27	661.57	727.55
ADHK 2010 (Miliar Rp)	375.58	380.02	407.80	430.58	458.74
Proporsi terhadap PDRB ADHB (Persen)	1.43	1.41	1.43	1.41	1.41
Pertumbuhan (Persen)	1.45	1.18	7.31	5.59	6.54

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selama lima tahun terakhir, total konsumsi akhir LNPRT terus mengalami peningkatan baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Pertumbuhan konsumsi LNPRT pada tahun 2018 sebesar 6,54 persen, dengan nilai konsumsi LNPRT yang meningkat menjadi sebesar 727,55 miliar rupiah atas dasar harga Berlaku dan 458,74 miliar rupiah atas dasar harga Konstan 2010.

Sementara itu, jika dilihat proporsinya terhadap perekonomian Kota Denpasar, konsumsi LNPRT memiliki peranan yang sangat kecil terhadap perekonomian Kota Denpasar. Hal ini terlihat dari proporsi LNPRT yang hanya berkisar di bawah 2 persen selama tahun 2014-2018. Proporsi konsumsi LNPRT berturut-turut sebesar 1,43 persen (2014); 1,41 persen (2015); 1,43 persen (2016); 1,41 persen (2017); dan 1,41 persen (2018).

3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang/jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah: a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang/jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang/jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sementara itu barang/jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri: a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang/jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang/jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan oleh TNI dan keamanan yang dilakukan oleh kepolisian.



TABEL 3.11

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kota Denpasar, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
ADHB (Miliar Rp)	4 270.15	4 706.57	5 487.78	6 164.49	6 819.19
ADHK 2010 (Miliar Rp)	3 244.37	3 432.08	3 650.90	3 810.73	3 944.31
Proporsi Terhadap PDRB (Persen)	12.48	12.25	12.95	13.12	13.26
Konsumsi Pemerintah Per Kapita					
ADHB (Ribuan Rp)	4 944.60	5 344.73	6 115.88	6 742.46	7 327.59
ADHK 2010 (Ribuan Rp)	3 756.80	3 897.43	4 068.77	4 168.02	4 238.38
Konsumsi Pemerintah Per Pegawai Pemerintah					
ADHB (Ribuan Rp)	580 184.05	633 454.66	766 663.84	1 028 100.87	1 198 452.02
ADHK 2010 (Ribuan Rp)	440 811.38	461 921.85	510 045.26	635 545.13	693 201.01
Pertumbuhan (Persen)					
Total Konsumsi Pemerintah	-8.92	5.79	6.38	4.38	3.51
Konsumsi Pemerintah Per Kapita	-6.11	8.09	14.43	10.25	8.68
Konsumsi Per Pegawai Pemerintah	-4.18	9.18	21.03	34.10	16.57
Jumlah penduduk	863 600	880 600	897 300	914 279	930 619
Jumlah Pegawai Pemerintah	7 360	7 430	7 158	5 996	5 690

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Pada tahun 2014, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga Berlaku adalah sebesar 4,27 triliun rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya terus meningkat hingga mencapai 6,82 triliun rupiah di tahun 2018. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB sedikit mengalami fluktuasi. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, masing-masing sebesar 12,48 persen (2014); 12,25 persen (2015); 12,95 persen (2016); 13,12 persen (2017); dan 13,26 persen (2018).

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Selama lima tahun terakhir konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga Berlaku mengalami fluktuasi. Konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga Berlaku terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,94 juta rupiah dan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 7,33 juta rupiah.

Konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga Konstan 2010 juga menunjukkan adanya fluktuasi setiap tahunnya, dengan masing-masing sebesar 3,76 juta rupiah (2014); 3,90 juta rupiah (2015); 4,07 juta rupiah (2016); 4,17 juta rupiah (2016); dan 4,24 juta rupiah (2017). Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi pengeluaran konsumsi pemerintah per kapita secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar -6,11 persen (2014); 8,09 persen (2015); 14,43 persen (2016); 10,25 persen (2017); dan 8,68 persen (2018).

Konsumsi per pegawai pemerintah atas dasar harga Berlaku menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2014 sebesar 580,18 juta rupiah, kemudian pada tahun berikutnya masing-masing sebesar 633,45 juta rupiah (2015); 766,66 juta rupiah (2016); 1,03 miliar rupiah (2017); dan 1,20 miliar rupiah (2018).

Pada tingkat harga Konstan, indikator yang menunjukkan pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya, masing-masing sebesar 440,81 juta rupiah (2014); 461,92

juta rupiah (2015); 510,04 juta rupiah (2016); 635,54 juta rupiah (2017); dan 693,20 juta rupiah (2018). Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010 menunjukkan fluktuasi, sejalan dengan jumlah pegawai pemerintah yang juga mengalami fluktuasi. Jumlah pegawai pemerintah terendah pada tahun 2018 yakni hanya sebanyak 5.690 pegawai.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk dan per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi total konsumsi pemerintah terjadi pada tahun 2015 dan 2016, masing-masing sebesar 5,79 persen dan 6,38 persen, sedangkan untuk konsumsi pemerintah per kapita terjadi pada tahun 2016 dan 2017, masing-masing sebesar 14,43 persen dan 10,25 persen. Sementara untuk konsumsi pemerintah per pegawai pertumbuhan tertinggi juga terjadi pada tahun 2016 dan 2017 yaitu masing-masing sebesar 21,03 persen dan 34,10 persen.

3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan mengenai bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari produk impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Selama kurun waktu 2014-2018, terlihat bahwa nilai PMTB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Pada tahun 2014, pengeluaran PMTB atas dasar harga Berlaku adalah sebesar 12,06 triliun rupiah, kemudian terus meningkat hingga mencapai 18,43 triliun rupiah di tahun 2018. Demikian halnya dengan pengeluaran PMTB atas dasar harga Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Sementara kontribusi PMTB terhadap total PDRB Denpasar berada pada kisaran 35,26 persen hingga 36,09 persen.

Data di bawah ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi dari 1,12 persen (2014) menjadi 9,18 persen (2018). Sementara di tahun lainnya masing-masing sebesar 8,35 persen (2015); 8,55 persen (2016); dan 3,61 persen (2017). Peningkatan yang terjadi selama lima tahun terakhir tersebut mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan PMTB dari sisi kuantitas.

TABEL 3.12
Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Denpasar, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai PMTB					
ADHB (Miliar Rp)	12 062.42	13 868.66	15 122.36	16 283.25	18 427.16
ADHK 2010 (Miliar Rp)	9 842.35	10 664.16	11 576.44	11 994.38	13 096.01
Proporsi terhadap PDRB ADHB (Persen)	35.26	36.09	35.68	34.64	35.82
Struktur PMTB (Persen)					
a. Bangunan	62.76	63.40	59.50	58.84	59.26
b. Non Bangunan	37.24	36.60	40.50	41.16	40.74
Total PMTB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Pertumbuhan (Persen)					
a. Bangunan	0.20	8.42	7.50	3.44	9.13
b. Non Bangunan	2.75	8.24	10.35	3.89	9.27
Total PMTB	1.12	8.35	8.55	3.61	9.18

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2.5 Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi, maupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti terjadi penambahan (bertanda positif) dan atau terjadi pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2014 perubahan inventori atas dasar harga Berlaku sebesar 374,03 miliar rupiah, kemudian menurun hingga 77,80 miliar rupiah pada tahun 2015. Pada tahun berikutnya perubahan inventori mulai meningkat kembali menjadi sebesar 99,31 miliar rupiah (2016), 142,33 miliar rupiah (2017), dan 154,91 miliar rupiah (2018).

TABEL 3.13
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kota Denpasar, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
ADHB (Miliar Rp)	374.03	77.79	99.31	142.33	154.91
ADHK 2010 (Miliar Rp)	194.89	39.05	49.11	52.67	55.64
Proporsi terhadap PDRB ADHB (Persen)	1.09	0.20	0.23	0.30	0.30

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB Kota Denpasar mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2014, proporsi perubahan inventori adalah 1,09 persen, selanjutnya sebesar 0,20 persen (2015); 0,23 persen (2016); 0,30 persen (2017); dan 0,30 persen (2018).

3.2.6 Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Denpasar tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

TABEL 3.14
Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Kota Denpasar, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
ADHB (Miliar Rp)	19 211.97	19 686.49	23 157.47	26 947.30	30 899.41
ADHK 2010 (Miliar Rp)	18 308.07	18 442.66	18 745.72	20 588.94	22 192.67
Proporsi					
Terhadap PDRB ADHB (Persen)	56.16	51.23	54.64	57.33	60.07
Pertumbuhan (Persen)	13.65	0.74	1.64	9.83	7.79

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2014-2018 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan tren peningkatan yang cukup besar setiap tahun. Pada tahun 2014, nilai ekspor barang dan jasa sebesar 19,21 triliun rupiah, meningkat menjadi 19,69 triliun pada tahun 2015. Pada tahun berikutnya nilai ekspor barang dan jasa masing-masing menjadi sebesar 23,16 triliun rupiah (2016); 26,95 triliun rupiah (2017); dan 30,90 triliun rupiah (2018).

Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga Konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil” sebesar 18,30 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi sebesar 22,19 triliun rupiah pada tahun 2018. Sementara itu, pada periode 2014 hingga 2018, proporsi dalam PDRB justru cenderung mengalami fluktuasi dari 56,16 persen pada tahun 2014 menjadi 60,07 persen pada tahun 2018.

Dilihat dari pertumbuhan riil total ekspor, selama lima tahun terakhir nilai ekspor cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2014 tumbuh sebesar 13,65 persen, kemudian mulai menurun pada tahun-tahun berikutnya. Tercatat penurunan pada masing-masing tahun menjadi sebesar 0,74 persen (2015); 1,64 persen (2016); 9,83 persen (2017); dan 7,79 persen (2018).

3.2.7 Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Denpasar. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB ekspor dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Denpasar di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kota Denpasar terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.


Pada tabel di bawah ini terlihat bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kota Denpasar berfluktuasi (baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010). Pada tahun 2014 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga Berlaku sebesar 18,19 triliun rupiah, kemudian mencapai 29,30 triliun rupiah pada tahun 2018. Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2014 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 53,18 persen. Kemudian pada tahun 2018 impor barang dan jasa meningkat menjadi sebesar 56,96 persen.

TABEL 3.15
Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Kota Denpasar, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
ADHB (Miliar Rp)	18 191.31	18 320.50	21 972.76	24 802.85	29 300.31
ADHK 2010 (Miliar Rp)	18 451.27	18 733.18	19 357.38	20 721.09	22 527.58
Proporsi					
terhadap PDRB	53.18	47.68	51.84	52.77	56.96
ADHB (Persen)					
Pertumbuhan	5.85	1.53	3.33	7.04	8.72
(Persen)					

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



**BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT
PDRB KOTA DENPASAR
MENURUT PENGELUARAN
2014-2018**

<https://denpasar.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kota Denpasar, namun di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah (produksi), pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB per kapita. Dalam kurun waktu tahun 2014-2018, PDRB per kapita Kota Denpasar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Denpasar rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

TABEL 4.1
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Kota Denpasar, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
ADHB	34 209.87	38 423.92	42 384.43	47 001.77	51 440.63
ADHK 2010	26 778.59	28 422.70	30 273.39	32 109.43	34 168.10
Pertumbuhan PDRB (Persen)	7.00	6.14	6.51	6.06	6.41
PDRB Per Kapita (Ribu Rp)					
ADHB	39 613.09	43 633.80	47 235.52	51 408.57	55 275.71
ADHK 2010	31 008.09	32 276.51	33 738.32	35 119.95	36 715.45
Pertumbuhan PDRB Per Kapita (Persen)	4.85	4.09	4.53	4.10	4.54
Jumlah Penduduk (000 orang)	863 600	880 600	897 300	914 279	930 619
Pertumbuhan Penduduk (Persen)	2.06	1.97	1.90	1.89	1.79

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selama kurun waktu tahun 2014-2018, pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” mampu tumbuh di atas empat persen. Disisi lain, perkembangan ekonomi yang terjadi diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat secara rata-rata di bawah tiga persen setiap tahunnya, atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita.

4.2 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

TABEL 4.2
Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB
Kota Denpasar, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	15 991.74	17 861.36	19 886.00	21 605.69	23 712.73
b. LNPRT	490.86	543.55	604.27	661.57	727.55
c. Pemerintah	4 270.15	4 706.57	5 487.78	6 164.49	6 819.19
Total Konsumsi Akhir PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	20 752.76	23 111.48	25 978.05	28 431.75	31 259.47
Proporsi Terhadap PDRB	60.66	60.15	61.29	60.49	60.77

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah Denpasar digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir.

Hal ini tercermin dari proporsi permintaan akhir yang berada pada kisaran 60,15 hingga 61,29 persen. Jika diperhatikan selama lima tahun terakhir, proporsi konsumsi akhir cenderung berfluktuasi, sempat mencapai 60,66 persen pada tahun 2014, lalu mengalami peningkatan hingga mencapai 60,77 persen pada tahun 2018. Meskipun secara nominal konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru mengalami fluktuasi, dengan kata lain laju peningkatan PDRB secara keseluruhan cenderung lebih tinggi dibandingkan konsumsi akhir.

4.3 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Denpasar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa rasio konsumsi akhir rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun. Pada tahun 2014, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB adalah sebesar 1,33, kemudian mulai menurun pada tahun-tahun berikutnya. Tercatat rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB pada tahun 2015 hingga 2018 masing-masing sebesar 1,29; 1,32; 1,33; dan 1,29. Penurunan rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB disebabkan oleh

adanya peningkatan nilai investasi yang cukup signifikan, serta nilai peningkatannya lebih tinggi dibandingkan konsumsi akhir rumah tangga, sehingga rasionya pun turun menjadi 1,29.

TABEL 4.3
Rasio Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB
Kota Denpasar, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	15 991.74	17 861.36	19 886.00	21 605.69	23 712.73
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	12 062.42	13 868.66	15 122.36	16 283.25	18 427.16
Rasio Konsumsi RT Terhadap PMTB	1.33	1.29	1.32	1.33	1.29

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

4.4 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini Ekspor mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam PDRB Pengeluaran Kota Denpasar karena rata-rata melebihi 50 persen. Hal ini berarti bahwa seluruh produk dan jasa yang dihasilkan di wilayah Kota Denpasar sebagian besar dikonsumsi rumah tangga, namun sebagian lagi diekspor.

TABEL 4.4

Rasio Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor
Kota Denpasar, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	15 991.74	17 861.36	19 886.00	21 605.69	23 712.73
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	19 211.97	19 686.49	23 157.47	26 947.30	30 899.41
Rasio Konsumsi RT Terhadap Ekspor	0.83	0.91	0.86	0.80	0.77

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2014, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga adalah 0,83 kali dari produk yang diekspor. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik digunakan untuk ekspor, terutama ekspor jasa. Selama tahun 2014 hingga 2018, terjadi penurunan rasio yang relatif rendah. Tercatat pada tahun 2014 rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor sebesar 0,83 kemudian naik menjadi 0,91 pada tahun 2015. Peningkatan rasio yang terjadi lebih disebabkan oleh laju peningkatan konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi dibandingkan laju peningkatan ekspor.

Selanjutnya pada tahun 2016 hingga 2018 rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor mulai menurun berturut-turut menjadi 0,86; 0,80; 0,77. Penurunan rasio yang terjadi disebabkan

karena pada tahun 2016 hingga tahun 2018 nilai ekspor mengalami peningkatan dan nilainya lebih tinggi dari peningkatan konsumsi akhir rumah tangga. Peningkatan atau penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu juga disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

4.5 Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan barang modal (PMTB). Sementara di sisi lain, sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang modal. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi modal (PMTB).

Pada kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2018, total PMTB dan nilai ekspor relatif sejalan, dimana mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dilihat rasio ekspor terhadap PMTB, dalam periode lima tahun terakhir cenderung meningkat, hanya terjadi fluktuasi yang cukup terbilang rendah. Fluktuasi yang terjadi lebih disebabkan karena adanya perbedaan laju peningkatan pada masing-masing komponen, namun perbedaannya masih terbilang rendah. Perbedaan yang sedikit besar terjadi pada tahun 2014 dan 2015, tercatat pada saat itu nilai ekspor meningkat sangat pesat, dan meskipun total

PMTB juga mengalami peningkatan yang cukup besar, tapi masih lebih rendah dibandingkan peningkatan nilai ekspor.

TABEL 4.5

Rasio Ekspor Terhadap PMTB Kota Denpasar, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	19 211.97	19 686.49	23 157.47	26 947.30	30 899.41
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	12 062.42	13 868.66	15 122.36	16 283.25	18 427.16
Rasio Ekspor Terhadap PMTB	1.59	1.42	1.53	1.65	1.68

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

4.6 Perbandingan PDRB Terhadap Impor

Rasio PDRB terhadap impor memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut juga menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Jika rasionya lebih kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, sebaliknya jika rasionya semakin besar berarti ketergantungan akan barang impor semakin rendah.

TABEL 4.6

Rasio Total PDRB Terhadap Impor Kota Denpasar, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	34 209.87	38 423.92	42 384.43	47 001.77	51 440.63
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	18 191.31	18 320.50	21 972.76	24 802.85	29 300.31
Rasio Total PDRB Terhadap Impor	1.88	2.10	1.93	1.90	1.76

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Rasio PDRB terhadap impor dari tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung berfluktuasi menurun, yaitu dari 1,88 pada tahun 2014 menjadi 1,76 pada tahun 2018. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai angka 2,10. Peningkatan rasio hingga 2,10 pada tahun 2015 lebih disebabkan oleh meningkatnya nilai impor, namun peningkatannya lebih rendah dibandingkan peningkatan PDRB. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 nilai impor mengalami peningkatan. Meskipun nilai impor terus meningkat, namun nilai PDRB juga terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini berakibat pada menurunnya rasio PDRB terhadap impor dari 2,10 pada tahun 2015 menjadi 1,76 pada tahun 2018. Rendahnya nilai rasio PDRB terhadap impor tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan PDRB terhadap produk impor mulai meningkat.



4.7 Keseimbangan Total Penyediaan Dan Total Permintaan

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

TABEL 4.7
Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Kota Denpasar, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u>					
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	16 018.55	20 103.43	20 411.67	22 198.92	22 140.32
Persentase	46.82	52.32	48.16	47.23	43.04
<u>Total Nilai Impor</u>					
(ADHB) (Miliar Rp)	18 191.31	18 320.50	21 972.76	24 802.85	29 300.31
Persentase	53.18	47.68	51.84	52.77	56.96
<u>Total Permintaan Akhir (Rumah Tangga, Pemerintah, LNPRT)</u>					
(ADHB) (Miliar Rp)	20 752.76	23 111.48	25 978.05	28 431.75	31 259.47
Persentase	60.66	60.15	61.29	60.49	60.77

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dalam kurun waktu 2014-2018, permintaan akhir masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 20,75 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi sebesar 31,26 triliun rupiah pada tahun 2018.

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi di Kota Denpasar belum mampu untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat, atau dengan kata lain masih harus mendatangkan sebagian produk dan jasa dari luar daerah. Produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan Kota Denpasar sendiri, setiap tahunnya sebesar 16,02 triliun rupiah (2014); 20,10 triliun rupiah (2015); 20,41 triliun rupiah (2016); 22,20 triliun rupiah (2017); dan 22,14 triliun rupiah (2018).

Terlihat bahwa produk domestik yang dihasilkan belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka perlu dilakukan impor berbagai produk barang dan jasa guna memenuhi kekurangan tersebut. Nilai impor Kota Denpasar selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi meningkat, tercatat pada tahun 2014 nilai impor sebesar 18,19 triliun rupiah, kemudian terus meningkat setiap tahunnya hingga sebesar 29,30 triliun rupiah pada tahun 2018.

4.8 Neraca Perdagangan (*Trade Balance*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar daerah (non residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor maka terjadi surplus, dan sebaliknya jika nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor maka yang terjadi adalah defisit.



Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya jika posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

TABEL 4.8
Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kota Denpasar,
2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor ADHB (Miliar Rp)	19 211.97	19 686.49	23 157.47	26 947.30	30 899.41
Nilai Impor ADHB (Miliar Rp)	18 191.31	18 320.50	21 972.76	24 802.85	29 300.31
Net Ekspor (X-M) (Miliar Rp)	1 020.66	1 365.99	1 184.71	2 144.44	1 599.10
Rasio Ekspor Terhadap Impor	1.06	1.07	1.05	1.09	1.05

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga, maupun kuantitas. Apabila nilai rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio-

kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu daerah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode tahun 2014-2018, posisi perdagangan barang dan jasa Kota Denpasar dengan luar daerah selalu menunjukkan nilai positif, atau dengan kata lain neraca perdagangan barang dan jasa Kota Denpasar selalu dalam posisi surplus. Surplus perdagangan Kota Denpasar yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat masing-masing sebesar 1,02 triliun rupiah (2014); 1,36 triliun rupiah (2015); 1,18 triliun rupiah (2016); 2,14 triliun rupiah (2017); dan 1,60 triliun rupiah (2018).

Sementara jika ditinjau dari rasio ekspor terhadap impor, terlihat bahwa selama periode tahun 2014 hingga 2018 sedikit berfluktuasi. Pada tahun 2014 rasio ekspor terhadap impor sebesar 1,06, lalu naik menjadi 1,07 pada tahun 2015, kemudian sedikit menurun menjadi 1,05 pada tahun 2016. Walaupun sempat meningkat di tahun 2017 menjadi 1,09, namun pada tahun 2018 rasionya kembali menurun menjadi 1,05. Penurunan rasio yang terjadi disebabkan oleh laju pertumbuhan impor yang nilainya lebih besar dibandingkan laju peningkatan ekspor.

4.9 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sementara output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap penambahan satu unit nilai output (keluaran) maka akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Penghitungan ICOR menggunakan formula sebagai berikut.

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana : I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Selama periode tahun 2014-2018, besaran ICOR relatif stabil pada kisaran nilai 5-6 dengan mengalami sedikit fluktuasi. Hal ini berarti setiap penambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak 5-6 unit. ICOR Kota Denpasar masing-masing tercatat sebesar 5,62 (2014), 6,49 (2015); 6,26 (2016); 6,53 (2017); dan 6,36 (2018).

TABEL 4.9
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Denpasar, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rp)	26 778.59	28 422.70	30 273.39	32 109.43	34 168.10
Perubahan (Miliar Rp)	1 752.38	1 644.11	1 850.70	1 836.04	2 058.66
PMTB ADHK 2010 (Miliar Rp)	9 842.35	10 664.16	11 576.44	11 994.38	13 096.01
ICOR	5.62	6.49	6.26	6.53	6.36

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara





LAMPIRAN

<https://denpasarkeaja.bps.go.id>

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	15 991 743.54	17 861 362.42	19 886 003.98	21 605 686.25	23 712 727.11
2. Konsumsi LNPR	490 856.92	543 547.45	604 268.02	661 570.37	727 546.59
3. Konsumsi Pemerintah	4 270 154.58	4 706 568.09	5 487 779.79	6 164 492.80	6 819 192.00
4. PMTB	12 062 420.30	13 868 660.01	15 122 364.08	16 283 250.83	18 427 161.71
5. Perubahan Inventori	374 033.75	77 794.05	99 311.66	142 329.26	154 907.94
6. Ekspor	19 211 970.20	19 686 488.26	23 157 466.39	26 947 298.43	30 899 409.94
7. Impor	18 191 313.68	18 320 495.89	21 972 759.54	24 802 854.02	29 300 314.89
PDRB	34 209 865.60	38 423 924.40	42 384 434.38	47 001 773.92	51 440 630.40

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	13 264 592.16	14 197 901.91	15 200 793.24	15 953 217.53	16 948 309.70
2. Konsumsi LNPRT	375 581.33	380 020.81	407 801.58	430 582.36	458 742.44
3. Konsumsi Pemerintah	3 244 371.77	3 432 079.37	3 650 903.99	3 810 728.61	3 944 313.76
4. PMTB	9 842 345.73	10 664 164.58	11 576 440.55	11 994 384.53	13 096 008.98
5. Perubahan Inventori	194 889.12	39 053.77	49 113.09	52 672.41	55 637.86
6. Ekspor	18 308 072.09	18 442 657.42	18 745 717.99	20 588 935.76	22 192 666.50
7. Impor	18 451 267.09	18 733 180.31	19 357 376.13	20 721 089.01	22 527 583.80
PDRB	26 778 585.10	28 422 697.54	30 273 394.32	32 109 432.18	34 168 095.44

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	46.75	46.49	46.92	45.97	46.10
2. Konsumsi LNPRT	1.43	1.41	1.43	1.41	1.41
3. Konsumsi Pemerintah	12.48	12.25	12.95	13.12	13.26
4. PMTB	35.26	36.09	35.68	34.64	35.82
5. Perubahan Inventori	1.09	0.20	0.23	0.30	0.30
6. Ekspor	56.16	51.23	54.64	57.33	60.07
7. Impor	53.18	47.68	51.84	52.77	56.96
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara



Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Konstan Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6.45	7.04	7.06	4.95	6.24
2. Konsumsi LNPRT	1.45	1.18	7.31	5.59	6.54
3. Konsumsi Pemerintah	-8.92	5.79	6.38	4.38	3.51
4. PMTB	1.12	8.35	8.55	3.61	9.18
5. Perubahan Inventori	-12.25	-79.96	25.76	7.25	5.63
6. Ekspor	13.65	0.74	1.64	9.83	7.79
7. Impor	5.85	1.53	3.33	7.04	8.72
PDRB	7.00	6.14	6.51	6.06	6.41

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar (2010=100) Menurut Pengeluaran, 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	120.56	125.80	130.82	135.43	139.91
2. Konsumsi LNPRT	130.69	143.03	148.18	153.65	158.60
3. Konsumsi Pemerintah	131.62	137.13	150.31	161.77	172.89
4. PMTB	122.56	130.05	130.63	135.76	140.71
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	104.94	106.74	123.53	130.88	139.23
7. Impor	98.59	97.80	113.51	119.70	130.06
PDRB	127.75	135.19	140.01	146.38	150.55

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar (2010=100) Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.68	4.35	3.99	3.52	3.31
2. Konsumsi LNPRT	12.19	9.44	3.60	3.69	3.22
3. Konsumsi Pemerintah	5.20	4.19	9.61	7.62	6.87
4. PMTB	5.08	6.11	0.45	3.92	3.65
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	6.63	1.72	15.73	5.95	6.38
7. Impor	-2.67	-0.81	16.07	5.45	8.66
PDRB	8.79	5.82	3.56	4.55	2.85

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



**SENSUS
EKONOMI**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DENPASAR**

Jl. Mulawarman No. 11, Denpasar
Telp.: (0361) 418770, Fax: (0361) 434326
Email: bps5171@bps.go.id
Homepage: <http://denpasarkota.bps.go.id>

ISBN 978-602-6395-24-5



9 786026 395245